



# **LAPORAN KINERJA TRIWULAN I CAMAT SENDURO**

**TAHUN 2025  
KECAMATAN SENDURO**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon II/Camat berkewajiban untuk membuat laporan kinerja Triwulan kepada Bupati Lumajang. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode Triwulan. Dan, Camat sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon II/Camat tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja Triwulan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Camat dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu Triwulan I tahun anggaran 2025. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

**1.1 PENJELASAN UMUM ORGANISASI**

**a. Letak Geografis**

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
1	Luas Wilayah	228,68 km <sup>2</sup>
2	Terdiri dari	12 Desa
3	Banyaknya penduduk	49.047 jiwa
4	Kepadatan penduduk	259 jiwa/ km <sup>2</sup>
5	Jumlah Kepala Keluarga ( KK )	16.552 KK
6	Ketinggian	500 - 700 dpl
7	Batas – batas :	
	• Sebelah Utara .....	Kecamatan Gucialit
	• Sebelah Timur .....	Kecamatan Sumpusuko
	• Sebelah Selatan .....	Kecamatan Pasrujambe
	• Sebelah Barat .....	Kabupaten Malang

b. Topografi

Kecamatan Senduro terdiri dari 12 desa yaitu :

1. Desa Argosari
2. Desa Bedayu
3. Desa Bedayutalang
4. Desa Burno
5. Desa Kandangan
6. Desa Kandangtepus
7. Desa Pandansari
8. Desa Purworejo
9. Desa Ranupani
10. Desa Sarikemuning
11. Desa Senduro
12. Desa Wonocepokoayu

c. Demografi

Jumlah Penduduk Kecamatan Senduro sampai dengan bulan 31 Maret 2025 sebagai berikut :

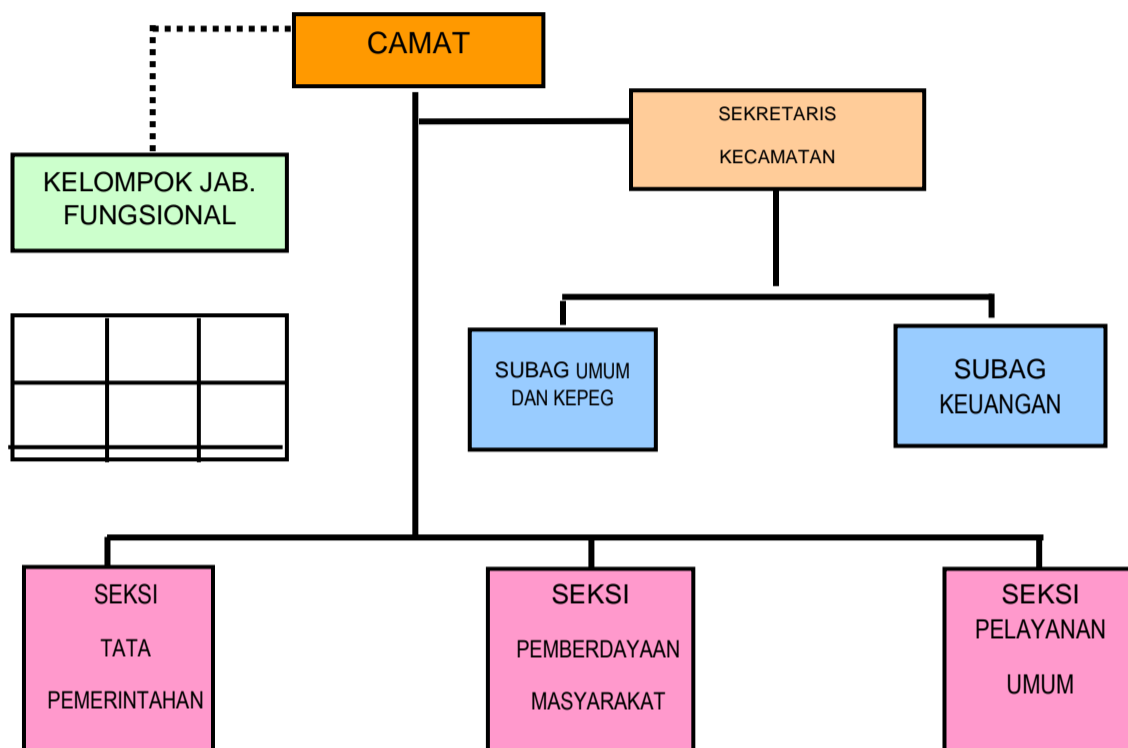
<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>	<b>TOTAL</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Desa Argosari	1.702 jiwa	1.608 jiwa	3.310 jiwa
2	Desa Bedayu	955 jiwa	1.039 jiwa	1.994 jiwa
3	Desa Bedayutalang	773 jiwa	813 jiwa	1.586 jiwa
4	Desa Burno	2.533 jiwa	2.409 jiwa	4.942 jiwa
5	Desa Kandangan	1.310 jiwa	1.301 jiwa	2.611 jiwa
6	Desa Kandangtepus	4.678 jiwa	4.558 jiwa	9.236 jiwa
	Desa Pandansari	2.419 jiwa	2.446 jiwa	4.865 jiwa
	Desa Purworejo	2.395 jiwa	2.387 jiwa	4.782 jiwa
	Desa Ranupani	738 jiwa	733 jiwa	1.471 jiwa
	Desa Sarikemuning	1.489 jiwa	1.462 jiwa	2.951 jiwa
	Desa Senduro	3.499 jiwa	3.457 jiwa	6.956 jiwa
7	Desa Wonocepkoayu	1.310 jiwa	1.301 jiwa	2.611 jiwa
	<b>Jumlah</b>	<b>23.801 jiwa</b>	<b>23.514 jiwa</b>	<b>47.315 jiwa</b>

d. Kelembagaan/Struktur Organisasi

a. Struktur Organisasi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan Senduro yang merupakan salah satu Kecamatan dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang, mempunyai Struktur Organisasi Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang sebagai berikut :



b. Tugas Pokok dan Fungsi :

a. Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahan di Wilayah Kecamatan.

b. Fungsi :

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- 7) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- 8) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;

- 9) Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

e. Personalia

Adapun data personil atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Kantor Kecamatan Senduro, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Daftar Nama PNS dan Tenaga Upah Bulanan  
sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL.	JABATAN
1	2	3	4
1	Drs. PUJIANTO 19681114 199003 1 004	Pembina (IV/a)	Camat
2	BAMBANG SUGIANTO, S.Pd. 19720605 199802 1 003	Penata Tk. I (III/d)	Sekretaris Kecamatan
3	AMINUDIN, S.Sos. 19670710 200701 1 047	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala Seksi Pemerintahan
4	TUTIK SAKARIA SADIKIN, S.E. 19700624 201001 2 004	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5	SUPRAYOGI 19671128 198903 1 007	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala Seksi Pelayanan Umum
6	SULIYANTO, S.Sos. 19750412 200906 1 005	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala Sub Bagian Keuangan
7	ANIN ALFIATIN ZAHRO, S.Pd. 19810420 200701 2 007	Penata Muda (III/a)	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8	ASIS WIYANTO 19710508 200501 1 007	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Umum
9	ATIK SURYANINGATI 19831219 201406 2 002	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Umum
10	SUTIYONO 19680511 201001 1 001	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Umum
11	ADRI IMA SURYANI, S.IP.	-	Pengadministrasi Persuratan
12	EVI DWI YUNITA	-	Pengelola Kepegawaian
13	FEBRI ANDRIANI, S.Pd.	-	Pengelola Program dan Kegiatan
14	MUHAMAD IMRON	-	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
15	MUHAMMAD IMAM BASHORI, SE.	-	Pengadministrasi Umum
16	NOVIKA MUFIDATUL FAIZAH, SP.	-	Pengadministrasi Umum
17	SUPRIYONO	-	Pengadministrasi Umum
18	UJANG HAMDANI	-	Pramu Kebersihan

## 1.2 ISU STRATEGIS ORGANIASI

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang menggambarkan potensi dan tantangan pembangunan yang dihadapi suatu daerah. Kondisi ini perlu diperhatikan karena berpengaruh dalam perencanaan pembangunan yang secara tidak langsung berdampak pada masyarakat di masa yang akan datang. Analisa isu strategis memiliki sifat antisipatif, karena berdampak pada jangka panjang berupa kerugian dan peluang yang terlewatkan jika tidak ditelaah secara mendalam. Karakteristik dari isu strategis ini memiliki kondisi yang penting, mendesak, jangka panjang, mendasar dalam menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Analisis isu strategis merupakan tahap terakhir dalam perencanaan pembangunan daerah. Bagian ini dinilai penting karena menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi dan hambatan pada daerah tersebut. Proses analisis isu strategi ini mencakup jangka pendek dan jangka panjang untuk menunjang sistem berkelanjutan.

Penyebab isu strategis menjadi salah satu dasar utama perumusan perencanaan pembangunan daerah adalah rumusan yang dihasilkan selaras dengan peluang serta cita-cita masyarakat terhadap kepala daerah. Oleh karena itu, perlu memperhatikan kriteria sebagai berikut: (i) memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, (ii) merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, (iii) memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah, (iv) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola, dan (v) prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Dalam hal ini, isu strategis yang dibahas merupakan intisari dari kompilasi permasalahan pembangunan yang telah disampaikan sebelumnya. Dimana, isu strategis terkait dengan masalah di wilayah kecamatan pasrujambe, perumusan isu strategis Kecamatan Senduro dapat digambarkan pada tabel berikut :

Masalah	Pokok Masalah	Isu Strategis
-1	-2	-3
Kurangnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan	Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Minimnya sosialisasi administrasi kependudukan kepada masyarakat di tingkat kecamatan dan desa
Sarana dan prasarana pelayanan yang belum sepenuhnya memadai		Dukungan sarana dan prasarana Dispendukcapil masih kurang
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa		Luasan ruang layanan yang belum memadai
		Kurangnya fasilitasi tata kelola pemerintahan desa

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat disimpulkan adanya 4 isu strategis utama. Adapun keempat isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Minimnya Sosialisasi administrasi kependudukan kepada masyarakat di tingkat kecamatan dan desa.

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan serta dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya hal tersebut perlu dilakukan sosialisasi di tingkat Kecamatan. Sosialisasi ini bertujuan supaya masyarakat melek administrasi kependudukan dan memberikan wawasan kepada masyarakat akan pentingnya mengurus administrasi kependudukan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.

- b. Dukungan sarana dan prasarana Dispendukcapil masih kurang

Dalam rangka mengoptimalkan Pelayanan di Kecamatan Senduro diperlukan standart pelayanan yang sesuai agar pelayanan dapat dilaksanakan dengan optimal.

- c. Luasan ruang layanan yang belum memadai

Standart sarana layanan yang baik meliputi adanya ruang merokok, Tempat Cuci tangan, tempat sholat, Toilet, Ruang tunggu, antian elektronik, dan ruang layanan.

Sehubungan dengan hal diatas bahwasanya ruang tunggu di Kecamatan yang sempit sehingga jika ada masyarakat yang mengajukan pelayanan masih banyak yang mengantri di luar oleh karena itu perlu dilakukan perluasan ruang tunggu pelayanan agar masyarakat nyaman dalam menerima layanan.

- d. Kurangnya Fasilitasi tata kelola pemerintahan desa

Fasilitasi tata kelola pemerintahan desa adalah kegiatan yang wajib dilakukan oleh Tim binwas Kecamatan agar kegiatan administrasi desa terutama pada fasilitasi pelaksanaan RKPdes, APBdes, serta pelaporan Desa (LPPD). Dalam hal mengoptimalkan kegiatan diatas perlu dilakukan Rakor setiap bulan serta pembinaan rutin setiap bulan agar pelaporan dan adminitrasi desa dapat disusun sesuai dengan ketentuan serta pelaporan dapat dilaksanakan tepat waktu.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. TARGET TUJUAN KECAMATAN SENDURO

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah (Permendagri 86 Tahun 2017). Dengan demikian dapat ditarik benang merah: sasaran menjelaskan tujuan, tujuan diturunkan secara operasional dari penjabaran Rancangan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang. Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lumajang 2024-2026, dalam rangka mewujudkan pembangunan Daerah di atas Kecamatan Senduro perlu menjabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Senduro, tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Senduro, sebagai berikut :

- a. Tujuan : Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi
- b. Indikator tujuan: Indeks Pelayanan Publik
- c. Target : 65.5 Angka

#### 2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berdasarkan dokumen perencanaan merupakan komitmen kepala perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Namun ditengah pelaksanaan tugas terdapat perubahan perjanjian kinerja terkait dengan perubahan anggaran pada masing-masing perangkat daerah. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja perangkat daerah menjadi tanggungjawab kepala perangkat daerah. Bupati selaku kepala daerah memberikan pengawasan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan kepala SKPD. Untuk perjanjian kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tertuang pada pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Lembar Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Camat tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	94,12%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100,00%



<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>SUMBER DANA</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 1.658.278.387,00	DAU
2	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 24.825.000,00	DAU
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 134.603.075,00	DAU
4	Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 15.100.000,00	DAU
5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 7.200.000,00	DAU
6	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 40.320.000,00	DAU
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 1.880.326.462,00</b>	



### PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. PUJIANTO**

Jabatan : Camat Senduro

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir.Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si**

Jabatan : Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 3 Maret 2025

Pihak Kedua  
  
**Ir.Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si**

Pihak Pertama  
  
**Drs. PUJIANTO**  
NIP. 19681114 199003 1 004

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. PENGUKURAN KINERJA**

Akuntabilitas merupakan suatu alat pengukuran pertanggung jawaban atas suatu kewajiban, sedangkan akuntabilitas kinerja merupakan suatu pengukuran pertanggungjawaban capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Akuntabilitas kinerja dibuat dan disusun dalam bentuk laporan yang disebut sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja atau biasa dikenal dengan istilah LKj.

Capaian indikator kinerja sasaran Camat Senduro Tahun 2025 secara umum dapat diuraikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja sasaran disamping berfungsi sebagai sarana pengembangan strategi organisasi di waktu yang akan datang juga secara teknis dapat digunakan sebagai alat untuk menunjukkan performance dari masing-masing unit kerja di lingkungan Kecamatan Senduro dalam rangka mengendalikan fungsi-fungsi managerial secara menyeluruh. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk tabel pengukuran kinerja kegiatan.

##### **3.1.1 CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS OPD s.d. TRIWULAN I TAHUN 2025**

Capaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Sedangkan hasil pengukuran capaian kinerja merupakan hasil perbandingan antara realisasi kinerja dengan target capaian kinerja dari masing-masing Indikator Kinerja, baik Indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Pendukung dari Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tujuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini Kecamatan Senduro yakni “Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi” yang dirumuskan dengan indikator tujuan yakni Indeks

Pelayanan Publik sedangkan formulasi perhitungan hasil perhitungan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten dalam hal ini Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang melakukan perhitungan secara terpadu terkait perangkat daerah pengampu IPP. Pengukuran kinerja pada Kecamatan Senduro Triwulan I Tahun 2025 digambarkan sebagai berikut.

Tabel 2.1  
Capaian Indikator Tujuan Kecamatan Senduro Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Capaian
1	Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	65,50 Angka	hasil perhitungan bagian organisasi di mana pencapaiannya dapat diketahui pada Triwulan IV

Pencapaian Indikator tujuan Kecamatan Senduro sampai dengan Triwulan I masih menunggu hasil perhitungan bagian organisasi.

Dalam kurun waktu Periode Triwulan I tahun 2025, sasaran Kecamatan Senduro ada 2 dari 2 indikator kinerja tersebut pencapaiannya dapat dijabarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.  
Lembar pencapaian sasaran Kinerja Camat sampai dengan Triwulan I tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian 5=4/5	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	94,12%	48,85%	36,70%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100,00%	58,33%	58,33%	

Penjelasan dari pencapaian Kinerja diatas sebagai berikut :

1. Sasaran Kinerja 1 Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan dengan indikator : Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti.

Fasilitasi dan Koordinasi seluruh kegiatan fasilitasi dan Koordinasi yang akan dilaksanakan di tahun 2025 yaitu

sejumlah 52 Fasilitasi dan Koordinasi, untuk periode 02 Januari 2025 s/d 31 Maret 2025 tercapai 26 fasilitasi dan koordinasi sebagai mana terjabarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3  
Jenis Fasilitas Dan Koordinasi Yang Sudah Dilaksanakan  
s/d Triwulan I tahun 2025

No	Nama Fasilitas	Terlaksana	Belum terlaksana	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyusunan Perdes	√		
2	Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		√	
3	Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyusunan Perdes RKPDes	√		
4	Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyusunan Perdes Perubahan RKPDes	√		
5	Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyusunan Perdes	√		
6	Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyusunan Raperdes Perubahan APBDes	√		
7	Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyusunan Perdes BUMDes	√		
8	Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyusunan Perdes Penyertaan Modal BUMDes	√		
9	Fasilitas Pembinaan Administrasi Umum Pemerintah Desa	√		
10	Fasilitas Sosialisasi Pelayanan Publik			
11	Fasilitas Pembinaan Administrasi Penduduk		√	
12	Fasilitas Pembinaan Administrasi Keuangan	√		
13	Fasilitas Pembinaan Administrasi Pembangunan		√	
14	Fasilitas Pembinaan Administrasi lainnya	√		
15	Fasilitas Pembinaan Perencanaan (APBDes dan Penjabaran APBDes)	√		
16	Fasilitas Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Desa DPA dan RAK	√		
17	Fasilitas Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa	√		
18	Fasilitas Pembinaan dalam Pelaporan Keuangan Desa (Laporan Semester 1 dan Laporan Akhir Tahun)	√		
19	Fasilitas Pembinaan Pertanggungjawaban (Perdes LPJ Realisasi APBDes)	√		
20	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan desa		√	

21	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi Kades dan Perangkat Desa		√		
22	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi BPD		√		
23	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Musrenbangdes	√			
24	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Musrenbangcam	√			
25	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Penyusunan Perubahan RKPDes	√			
26	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		√		
27	Pembinaan Linmas		√		
28	Pembinaan SKD		√		
29	Monitoring dan Evaluasi Trantibum		√		
30	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi LPMD	√			
31	Fasilitasi Musdes yang partisipatif	√			
32	Fasilitasi Musrenbangdes yang partisipatif	√			
33	Fasilitasi Musrenbangcam yang partisipatif	√			
34	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	√			
35	Fasilitasi Penyusunan RKPDes yang partisipatif		√		
36	Fasilitasi Penyusunan Perubahan RKPDes yang partisipatif		√		
37	Sosialisasi Pertanahan (Data Batas Desa)		√		
38	Fasilitasi Penyusunan Program Pembedayaan Masyarakat Desa dalam Musrenbangdes	√			
39	Fasilitasi Penyusunan Program Pembedayaan Masyarakat Desa dalam Musrenbangcam	√			
40	Fasilitasi Penyusunan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Penyusunan RPJMDes		√		

41	Fasilitasi Penyusunan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Perubahan RPJMDes		√		
42	Fasilitasi Penyusunan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Penyusunan RKPDes		√		
43	Fasilitasi Penyusunan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Penyusunan Perubahan RKPDes		√		
44	Fasilitasi Sosialisasi Pelayanan Publik	√			
45	Fasilitasi Pengelola Administrasi Umum dan Kepegawaian				
46	Fasilitasi Penyusunan Laporan Perencanaan dan Kinerja				
47	Fasilitasi Penyusunan Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran				
48	Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan				
49	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan				
50	Koordinasi Pendampingan Desa				
51	Koordinasi dalam Penyelenggaraan Musdes dan Musrenbangdes		√		
52	Fasilitasi Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				
<b>JUMLAH</b>		<b>26</b>	<b>18</b>	<b>50,00 %</b>	

Dalam hal perhitungan pencapaian sasaran 1 digunakan rumus serta cara perhitungan sebagai berikut :

No	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI	PERHITUNGAN	
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi dikali 100}}$	$\frac{26}{52}$	50,00%

2. Sasaran Kinerja 2 Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa dengan indikator : Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu,

Yang dimaksud dokumen administrasi pemerintahan desa pada definisi ini adalah RKPDesa, APBDesa, LPPDesa yang disusun tepat waktu.

a. RKP dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September.



- b. APBDesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- c. LPPDesa dikatakan tepat waktu, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat

Dalam periode 02 Januari 2024 s/d 31 Maret 2025 desa yang menyampaikan Dokumen LPPDesa tepat waktu dan Desa yang menetapkan RKPDesa Tepat waktu dapat dilihat pada gambaran tabel di bawah ini :

Jenis Dokumen										
		LPPDes (Januari s.d. Maret)			RKPDes (30 September)			APBDes (31 Desember)		
NO	Desa	Tanggal Penetapan	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tanggal Penetapan	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tanggal Penetapan	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
1	Argosari	30 Januari 2025	√		28 Februari 2025	√				
2	Bedayu	20 Februari 2025	√		21 Februari 2025	√				
3	Bedayutalang				10 Maret 2025	√				
4	Burno	04 Februari 2025	√		25 Februari 2025	√				
5	Kandangan	16 Januari 2025	√		24 Februari 2025	√				
6	Kandangtepus	06 Januari 2025	√		25 Februari 2025	√				
7	Pandansari	21 Februari 2025	√							
8	Purworejo	31 Desember 2024	√		21 Februari 2024	√				
9	Ranupani	05 Maret 2025	√		26 Februari 2025	√				
10	Sarikemuning	03 Maret 2025	√		24 Februari 2025	√				
11	Senduro	04 Maret 2025	√							
12	Wonocepokoayu	09 Februari 2025	√		25 Februari 2025	√				
<b>JUMLAH</b>			<b>11</b>	<b>0</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CAPAIAN</b>			<b>91,67%</b>		<b>CAPAIAN</b>	<b>83,33%</b>		<b>CAPAIAN</b>	<b>0%</b>	

Dalam hal perhitungan pencapaian sasaran 2 digunakan rumus serta cara perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{11 + 10 + 0}{12 \times 3} \times 100\% = \frac{21}{36} \times 100\% = 58,33\%$$

### 3.1.2 CAPAIAN KINERJA PROGRAM YANG MENUNJANG KINERJA SASARAN OPD

Dalam hal mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.4 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Cost per outcome Camat Tahun 2025 - Triwulan I sasaran 1

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	T	R	%	
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti				94,12%	48,85%	34,54%	0,00
<b>Program</b>									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	=PROPER('FORM E 81 PD TW I 2025'!\$D\$19)	Rp. 1.658.278.387,00	Rp. 196.968.816,00	11,88 %	100,00 %	15,93 %	15,93 %	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Presentase Pelayanan Paten Sesuai Sp Dan Sop	Rp. 24.825.000,00	Rp. 0,00	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rata-Rata Presentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 134.603.075,00	Rp. 12.650.000,00	9,40 %	100,00 %	28,33 %	28,33 %	-15,58 %
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase Fasilitasi Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 15.100.000,00	Rp. 0,00	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 7.200.000,00	Rp. 0,00	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	
<b>Rata - Rata Pencapaian Anggaran</b>					4,26 %	<b>100,00 %</b>	<b>48,85 %</b>	<b>48,85 %</b>	

Tabel 2.4  
Cost per outcome Camat Tahun 2025 - Triwulan I Sasaran 2

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	T	R	%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu				100,00 %	58,33 %	58,33 %	0 %
<b>Program</b>									
6	Terpenuhinya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	Rp. 40.320.000,00	Rp. 0,00	0,00 %	100,00 %	83,33 %	83,33 %	
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	-116,67 %
		Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00 %	100,00 %	91,67 %	91,67 %	
<b>Rata - Rata Pencapaian Anggaran</b>					0,00 %			<b>83,33 %</b>	

### 3.1.3 PENYAJIAN DATA KINERJA

Adapun pengukuran capaian kinerja pada Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Triwulan I sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.3. Target Indikator Kinerja dalam Renstra Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Target		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi		Indeks Pelayanan Publik	Angka	Hasil Penghitungan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten	60,5 (B-)	65,5 (B-)	70,5 (B-)
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Persen	Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi dikali 100	94,12	94,12	94,23
	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Persen	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes tepat waktu + Jumlah Desa yang menyusun APBDes tepat waktu + Jumlah Desa yang menyusun LPPDes tepat waktu dibagi Jumlah seluruh desa diwilayah kecamatan dikali 3 dokumen administrasi Pemerintahan desa dikali 100	72,22	72,22	72,22

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta guna tercapainya target tujuan dan target sasaran strategis pada Kecamatan Senduro Tahun 2025, diperlukan program guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun program pada Kecamatan Senduro Tahun 2025 ada 6 program yakni 1 Program penunjang dan 5 program pelaksanaan kinerja tujuan dan sasaran.

## 3.2. ANALISA CAPAIAN KINERJA

### 3.2.1 ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

Untuk menunjang capaian kinerja Kecamatan Senduro, didukung oleh kinerja dari masing-masing bagian sebagai pengampu program atau kegiatan yang ada di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, antara lain :

1. Komitmen terhadap Rencana Program dan Kegiatan yang ada;
2. Bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan;
3. Melaksanakan penyelesaian SPJ dan program kegiatan sesuai rencana;
4. Disiplin kinerja Aparatur Sipil Negara;
5. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi yang memadai;

6. Tersedianya mekanisme proses pelayanan yang efektif;
7. Inisiatif, kreatif dan kerjasama tim;
8. Faktor kepemimpinan, aspek yang menjadi factor keberhasilan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Senduro adalah motivasi, arahan dan bimbingan dari pemimpin serta pengambilan keputusan yang dilakukan pemimpin

### **3.2.2 ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

Adapun faktor penghambat keberhasilan capaian kinerja pada Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, antara lain :

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
2. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas;
3. Belum terisinya beberapa jabatan Pelaksana di kecamatan Pasrujambe;
4. Kurangnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan;
5. Masih lemahnya koordinasi antar Perangkat Daerah dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
6. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan data kependudukan sehingga dapat menghambat pelayanan.

### **3.2.3 UPAYA/SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM MENCAPAI KINERJA**

1. Mengoptimalkan sarana dan prasana yang ada;
2. Mengoptimalkan SDM yang ada;
3. Mengoptimalkan personil yang ada;
4. Mengoptimalkan Publikasi SP dan SOP Prosedur Pelayanan;
5. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan data kependudukan sehingga dapat menghambat pelayanan.

### 3.2.4 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			T	R	%	P	R	%	
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	94,12%	48,85%	48,85%	Rp. 1.840.006.462,00	Rp. 209.618.816,00	11,39%	0,37%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100,00%	58,33%	58,33%	Rp. 40.320.000,00	Rp. 0,00	0,00%	0,58%

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pencapaian pada sasaran strategis 1 sampai dengan Triwulan I mencapai 48,85% dengan total anggaran yang digunakan dari pagu sebesar 11,39% efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja dapat dihitung dengan rumus :  
Efisiensi : %Pencapaian Kinerja - %Realisasi anggaran : 48,85% - 11,39% = 0,37% menunjukkan bahwa sudah efisien dalam penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja pada Triwulan I tahun 2025.
2. Pencapaian pada sasaran strategis 2 sampai dengan Triwulan I mencapai 58,33% dengan total anggaran yang digunakan dari pagu sebesar 0,00% efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja dapat dihitung dengan rumus :  
Efisiensi : %Pencapaian Kinerja - %Realisasi anggaran : 58,33% - 0,00% = 0,58% menunjukkan bahwa sudah efisien dalam penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja pada Triwulan I tahun 2025.

### 3.2.5 ANALISIS PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN

Program yang dilaksanakan Kecamatan Senduro pada tahun 2025 sejumlah 6 program, analisis program yang menunjang keberhasilan dapat dijabarkan pada tabel sebagai berikut :

Analisis Program Yang Penunjang Keberhasilan  
s.d. Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Perangkat Daerah, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Faktor pendukung keberhasilan	Faktor penghambat keberhasilan
Terfasilitasinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran</i>	1. Mengoptimalkan SDM yang ada	1. Masih Kurangnya SDM Kecamatan Senduro
			2. Mengoptimalkan sarana dan Prasarana yang ada	2. Sarana dan Prasarana Kecamatan belum memadai
Terpenuhinya Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	<i>Presentase Pelayanan Paten Sesuai SP Dan SOP</i>	Mengoptimalkan sarana dan prasana yang ada	Bangunan Pelayanan masih belum memadai
Terfasilitasinya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	<i>Rata-Rata Presentase Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat</i>	Melaksanakan Evaluasi Paska pelaksanaan kegiatan	Belum optimalnya evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat
Terfasilitasinya Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	<i>Presentase Fasilitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</i>	Melakukan Koordinasi dengan Pemerintahan Desa terkait data Linmas dan pembuatan SK terkait	Belum adanya SK kepala Desa terkait personil Linmas
Terfasilitasinya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	<i>Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>	Peningkatan volume Patroli forkopimca serta sinergitas dengan babinsa dan babinkamtibmas	Masih adanya gangguan keamanan dan ketertiban umum
Terpenuhinya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Persentase Desa Yang Menetapkan RKPDes Tepat Waktu</i>	Melakukan pembinaan kembali kepada perangkat desa terkait teknis penyusunan RAB	Pendampingan terkait penyusunan RAB yang belum optimal
		<i>Persentase Desa Yang Menetapkan APBDes Tepat Waktu</i>	Melakukan Desk Awal Sebelum Penetapan APBDes	Peraturan yang berubah ubah sehingga dapat menghambat penyusunan APBDes
		<i>Persentase Desa Yang Menetapkan LPPDes Tepat Waktu</i>	Melakukan Desk Awal Sebelum Penetapan LPPDes	Dokumen sudah disampaikan tepat waktu namun masih belum sesuai dengan ketentuan

### 3.2.6 REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Kecamatan Senduro sampai dengan Triwulan I tahun 2024 dapat dijabarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel Realisasi Anggaran  
s/d Triwulan I Tahun 2025

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran</i>	100,00 %	1.658.278.387,00	15,93 %	196.968.816,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Persentase Pelayanan Paten Sesuai SP Dan SOP</i>	100,00 %	24.825.000,00	0,00 %	0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Rata-Rata Presentase Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat</i>	100,00 %	134.603.075,00	28,33 %	12.650.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase Fasilitas Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</i>	100,00 %	15.100.000,00	100,00 %	0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>	100,00 %	7.200.000,00	100,00 %	0,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase Desa Yang Menetapkan RKPDes Tepat Waktu</i>	100,00 %	40.320.000,00	83,33 %	0,00
	<i>Persentase Desa Yang Menetapkan APBDes Tepat Waktu</i>	100,00 %		0,00 %	0,00
	<i>Persentase Desa Yang Menetapkan LPPDes Tepat Waktu</i>	100,00 %		91,67 %	0,00

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Ringkasan Capaian Kinerja**

Laporan Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 Pertanggungjawaban yang dilaksanakan mulai bulan Januari s/d 31 Maret 2025 sesuai dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang akan dicapai. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Laporan Kinerja memuat target realisasi, strategi pencapaian, langkah – langkah keberhasilan serta cara mengatasi hambatan pada pencapaian kinerja. efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pencapaian pada sasaran strategis 1 sampai dengan Triwulan I mencapai 48,85% dengan total anggaran yang digunakan dari pagu sebesar 11,39% efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja dapat dihitung dengan rumus :  
Efisiensi : %Pencapaian Kinerja - %Realisasi anggaran : 48,85% - 11,39% = 0,37% menunjukkan bahwa sudah efisien dalam penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025.
- b. Pencapaian pada sasaran strategis 2 sampai dengan Triwulan I mencapai 58,33 % dengan total anggaran yang digunakan dari pagu sebesar 0,00% efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja dapat dihitung dengan rumus :  
Efisiensi : %Pencapaian Kinerja - %Realisasi anggaran : 58,33% - 0,00% = 0,58% menunjukkan bahwa sudah efisien dalam penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025.

#### **4.2 Langkah/strategi mendatang untuk meningkatkan capaian kinerja kedepan**

Langkah/strategi mendatang untuk meningkatkan capaian kinerja ke depan pada triwulan berikutnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sarana dan prasana yang ada;
2. Mengoptimalkan SDM yang ada;
3. Mengoptimalkan personil yang ada;
4. Mengoptimalkan Publikasi SP dan SOP Prosedur Pelayanan;
5. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;



6. Meningkatkan Kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan data kependudukan sehingga dapat menghambat pelayanan.

Lumajang, 31 Maret 2025

CAMAT SENDURO



**Drs. PUJIANTO**

NIP. 19681114 199003 1 004



# **LAPORAN KINERJA SEKRETARIS KECAMATAN**

**Triwulan I Tahun 2025**

**Pemerintah Kabupaten Lumajang  
Kecamatan Senduro**

## KATA PENGANTAR

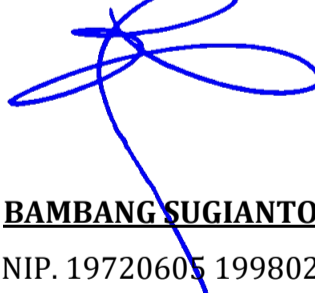
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang pada Triwulan I Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Sekretaris Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Sekretaris Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Triwulan I Tahun 2025.

Senduro, 15 Maret 2025

**Sekretaris Kecamatan Senduro**



**BAMBANG SUGIANTO, S.Pd.**

NIP. 19720605 199802 1 003

## BABI

### PENDAHULUAN

#### A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1 Penyusunan rencana kerja Sekretariat Kecamatan;
- 2 Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- 3 Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan;
- 4 Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
- 5 Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
- 6 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- 7 Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
- 8 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

#### B. Struktur Jabatan

Gambar 1.1.

#### Struktur Organisasi Sekretariat Kecamatan



Sekretariat kecamatan terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan.

## **Tugas dan fungsi Sekretariat Kecamatan:**

### **1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan rumah tangga kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a.** menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b.** melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c.** menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
- d.** melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
- e.** melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
- f.** melakukan administrasi kepegawaian;
- g.** melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
- h.** melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
- i.** melakukan administrasi barang milik daerah;
- j.** melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
- k.** melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- l.** melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m.** melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- n.** memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;

### **1. Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan keuangan dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a.** menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b.** melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
- c.** melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- d.** menyusun laporan perencanaan dan kinerja (renstra, renja, LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat);
- e.** melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- f.** penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
- g.** melakukan penyusunan laporan keuangan;

- h.** melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- i.** melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- j.** memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**2.1. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana yang telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Sekretaris Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang pada tanggal tanggal 10 Januari 2025 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti di bawah ini :

**Tabel 2.1.**  
**Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja**  
**Sekretaris Kecamatan Senduro Tahun 2025**

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025
1	2	3	5
1	TERFASILITASINYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA (E81_B19)	PERSENTASE PEMENUHAN FASILITASI KEBUTUHAN OPERASIONAL PERKANTORAN (E81_D19)	100 %
2	TERPENUHINYA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (E81_B51)	PRESENTASE PELAYANAN PATEN SESUAI SP DAN SOP (E81_D51)	100 %
3	TERFASILITASINYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (E81_B56)	RATA-RATA PRESENTASE FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (E81_D56)	100 %
4	TERFASILITASINYA PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (E81_B64)	PRESENTASE FASILITASI KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (E81_D64)	100 %
5	Terfasilitasinya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (E81_B68)	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (E81_D68)	100 %
6	Terpenuhinya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (E81_B71)	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu (E81_D71)	100 %
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu (E81_D72)	100 %
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu (E81_D73)	100 %

No	Sub Kegiatan	Anggaran	
1	2	3	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (E81_C20)	Rp.	17.553.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (E81_C26)	Rp.	1.209.007.124,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (E81_C31)	Rp.	7.599.500,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (E81_C34)	Rp.	8.180.700,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah (E81_C36)	Rp.	132.283.259,00
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (E81_C43)	Rp.	24.631.604,00
7	Penyediaan JasaPenunjang Urusan Pemerintahan Daeah (E81_C45)	Rp.	211.608.000,00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (E81_C48)	Rp.	47.415.200,00
9	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tngkat Kecamatan (E81_C52)	Rp.	14.700.000,00
10	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat (E81_C54)	Rp.	10.125.000,00
11	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (E81_C57)	Rp.	78.028.075,00
12	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (E81_C65)	Rp.	15.100.000,00
13	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (E81_C69)	Rp.	7.200.000,00
14	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (E81_C74)	Rp.	40.320.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>1.823.751.462,00</b>

## 2.2. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Sekretaris Kecamatan Senduro pada Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi di masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat Laporan Kinerja Sekretaris Kecamatan Senduro pada Triwulan I Tahun 2025 capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2**

### SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91%≤100%	Sangat Tinggi
2	76%≤90%	Tinggi
3	66%≤75%	Sedang
4	51%≤65%	Rendah
5	≤50%	Sangat Rendah



Adapun capaian Sekretaris Kecamatan dalam kurun waktu Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Capaian Kinerja Sekretaris Kecamatan Triwulan I Tahun 2025**

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	5	6	7	8
1	TERFASILITASINYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA (E81_B19)	PERSENTASE PEMENUHAN FASILITASI KEBUTUHAN OPERASIONAL PERKANTORAN (E81_B19)	100,00 %	15,93 %	15,93 %	Sangat Rendah
2	TERPENUHINYA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (E81_B51)	PRESENTASE PELAYANAN PATEN SESUAI SP DAN SOP (E81_B51)	100,00 %	0,00 %	0,00 %	Sangat Rendah
3	TERFASILITASINYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (E81_B56)	RATA-RATA PRESENTASE FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (E81_B56)	100,00 %	28,33 %	28,33 %	Sangat Rendah
4	TERFASILITASINYA PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (E81_B64)	TERFASILITASINYA PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (E81_B64)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	Sangat Tinggi
5	Terfasilitasinya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (E81_B68)	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (E81_B68)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	Sangat Tinggi
6	Terpenuhinya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (E81_B71)	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu (E81_B71)	100,00 %	0,00 %	0,00 %	Sangat Rendah
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu (E81_B72)	100,00 %	0,00 %	0,00 %	Sangat Rendah
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu (E81_B73)	100,00 %	0,00 %	0,00 %	Sangat Rendah
<b>Capaian Rata-rata</b>					<b>30,53 %</b>	<b>Sangat Rendah</b>

Dengan rincian realisasi kinerja kegiatan pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025**

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025		Realisasi		Capaian		Keterangan
1	2	3	4		5		6		7
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (E81_C20)	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja (E81_D20)	100,00	%	-	%	0,00	%	Sangat Rendah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (E81_C26)	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (E81_D26)	100,00	%	-	%	-	%	Sangat Rendah
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (E81_C31)	Jumlah fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100 (E81_D31)	100,00	%	-	%	0,00	%	Sangat Rendah
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (E81_C34)	Jumlah fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD yang direncanakan dikali 100 (E81_D34)	100,00	%	-	%	-	%	Sangat Rendah
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah (E81_C36)	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah (E81_D36)	100,00	%	12,90	%	12,90	%	Sangat Rendah
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (E81_C43)	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah (E81_D43)	100,00	%	50,00	%	50,00	%	Sangat Rendah
7	Penyediaan JasaPenunjang Urusan Pemerintahan Daeah (E81_C45)	Persentase fasilitasi jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (E81_D45)	100,00	%	16,67	%	16,67	%	Sangat Rendah
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (E81_C48)	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah (E81_D48)	100,00	%	16,00	%	16,00	%	Sangat Rendah
9	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tngkat Kecamatan (E81_C52)	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan (E81_D52)	100,00	%	-	%	-	%	Sangat Rendah
10	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat (E81_C54)	persentase faslitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat (E81_D54)	100,00	%	-	%	0,00	%	Sangat Rendah
11	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (E81_C57)	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa (E81_D57)	100,00	%	50,00	%	50,00	%	Sangat Rendah
12	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (E81_C61)	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan (E81_D61)	100,00	%	6,67	%	6,67	%	Sangat Rendah
13	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (E81_C65)	Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (E81_D65)	2	fasilitasi	2	fasilitasi	100,00	%	Sangat Tinggi
14	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (E81_C69)	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (E81_D69)	1	fasilitasi	1	fasilitasi	100,00	%	Sangat Tinggi
15	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (E81_C74)	Presentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (E81_D74)	100,00	%	100,00	%	100,00	%	Sangat Tinggi
<b>Rata-rata capaian realisasi kinerja</b>							<b>25,16</b>	<b>%</b>	<b>Sangat Rendah</b>

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.3 di atas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.5 di bawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.5

## Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcomes) pada Triwulan I Tahun 2025

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja		
			Pagu	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TERFASILITASINYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA (E81_B19)	PERSENTASE PEMENUHAN FASILITASI KEBUTUHAN OPERASIONAL PERKANTORAN (E81_D19)	1.658.278.387,00	196.968.816,00	11,88 %	100 %	16 %	15,93 %
2	TERPENUHINYA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (E81_B51)	PRESENTASE PELAYANAN PATEN SESUAI SP DAN SOP (E81_D51)	24.825.000,00	0,00	0,00 %	100 %	0 %	0,00 %
3	TERFASILITASINYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (E81_B56)	RATA-RATA PRESENTASE FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (E81_D56)	134.603.075,00	12.650.000,00	9,40 %	100 %	28 %	28,33 %
4	TERFASILITASINYA PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (E81_B64)	PRESENTASE FASILITASI KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (E81_D64)	15.100.000,00	0,00	0,00 %	100 %	100 %	100,00 %
5	Terfasilitasinya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (E81_B68)	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (E81_D68)	7.200.000,00	0,00	0,00 %	100 %	100 %	100,00 %
	Terpenuhinya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (E81_B71)	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu (E81_D71)	40.320.000,00	0,00	0,00 %	100 %	0 %	0,00 %
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu (E81_D72)	0,00	0,00	0,00 %	100 %	0 %	0,00 %
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu (E81_D73)	0,00	0,00	0,00 %	100 %	0 %	0,00 %
<b>Capaian Rata-rata</b>					<b>2,66 %</b>			<b>30,53 %</b>

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (cost per outcomes) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Sekretaris Kecamatan pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 2,66% yang diperoleh dari perhitungan sesuai dengan formulasi pada indikator kinerja Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yaitu Jumlah Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran yang dipenuhi dibagi jumlah Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran yang direncanakan dikali 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 30,53%. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi tinggi dalam pencapaian target kinerja.

### 2.3.EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formulasi	Target 2025	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TERFASILITASI SINYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA (E81_B19)	PERSENTASE PEMENUHAN FASILITASI KEBUTUHAN OPERASIONAL PERKANTORAN (E81_D19)	$\Sigma$ Fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi \ $\Sigma$ Fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang direncanakan * 100	100,00 %	15,93 %	15,93 %	Sangat Rendah
<b>Capaian Rata-rata</b>						<b>15,93 %</b>	<b>Sangat Rendah</b>

Sasaran yang akan dicapai Sekretaris Kecamatan pada Triwulan I Tahun 2025 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis Indikator kinerja Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran dengan target 100,00% terealisasi 15,93% sehingga capaiannya sebesar 15,93%.

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 1 (satu) indikator kinerja Sekretariat Kecamatan dengan persentase capaian kinerja sebesar 15,93% masuk kepada kategori "**Sangat Rendah**". Adapun penyebab keberhasilan ini antara lain karena :

1. Adanya komitmen bersama.
2. Dukungan perencanaan yang bagus
3. Dukungan data yang lengkap dan benar
4. Dukungan sarana prasarana yang memadai
5. Dukungan koordinasi yang cukup baik

Hal ini tidak terlepas dari komitmen Sekretaris Kecamatan dengan Camat yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Sekretaris Kecamatan, penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA kemudian

disinkronkan dengan realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2025 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.6 sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025**

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (E81_C21)	4.767.000,00	-	0,00 %
2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD (E81_C22)	2.800.000,00	-	0,00 %
3	Koordinasi dan penyusunan perubahan RKA-SKPD (E81_C23)	1.360.000,00	-	0,00 %
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (E81_C24)	3.382.000,00	1.869.300,00	55,27 %
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (E81_C25)	5.244.000,00	-	0,00 %
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (E81_C27)	1.173.540.124,00	164.834.211,00	14,05 %
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (E81_C28)	29.712.000,00	-	0,00 %
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (E81_C29)	2.155.000,00	-	0,00 %
9	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (E81_C30)	3.600.000,00	-	0,00 %
10	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD (E81_C32)	4.236.000,00	-	0,00 %
11	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (E81_C33)	3.363.500,00	-	0,00 %
12	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya (E81_C35)	8.180.700,00	-	0,00 %
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (E81_C37)	3.393.270,00	451.000,00	13,2910143 %
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (E81_C38)	43.616.681,00	-	0,00 %
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (E81_C39)	10.624.378,00	705.500,00	6,64 %
16	Penyediaan Bahan/Material (E81_C40)	3.162.930,00	-	0,00 %
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu (E81_C41)	12.150.000,00	633.000,00	5,21 %
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (E81_C42)	59.336.000,00	1.575.000,00	2,65 %
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (E81_C44)	24.631.604,00	620.000,00	2,52 %
20	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (E81_C46)	35.520.000,00	4.386.171,00	12,35 %
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (E81_C47)	176.088.000,00	15.740.634,00	8,94 %
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (E81_C49)	36.065.200,00	4.104.000,00	11,38 %
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (E81_C50)	11.350.000,00	2.050.000,00	18,06 %
<b>Jumlah</b>		<b>1.658.278.387,00</b>	<b>196.968.816,00</b>	<b>11,88 %</b>

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori “**Sangat Rendah**”, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

#### **2.4. Hambatan dalam pencapaian target kinerja**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Sekretariat Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana kecamatan;
2. Kurang terpeliharanya sarana prasarana pelayanan;
3. Belum optimalnya kuantitas SDM yang sesuai standar kebutuhan unit kerja pelaksanaan pelayanan publik;
4. Belum optimalnya kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat yang kondusif;
5. SDM dan kapasitas aparatur pemerintahan desa yang belum optimal.

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala dengan sumber daya yang ada;
2. Peningkatan kualitas SDM sesuai standar melalui pembinaan berkala;
3. Pembinaan aparatur pemerintah desa melalui monitoring dan evaluasi;
4. Mengoptimalkan koordinasi dengan forum komunikasi pimpinan kecamatan (forkopimca) dan Linmas melalui patroli keliling.

#### **2.5. RENCANA TINDAK LANJUT**

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu :

1. Penyusunan Renja terfokus kepada beberapa sub kegiatan yang bisa menambah nilai pelayanan publik dan sub kegiatan yang lebih penting;
2. Lebih meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan operasional perkantoran, pemenuhan pelaporan capaian keuangan walaupun tanpa anggaran;
3. Perbaiki sarana dan prasarana yang tidak layak fungsi supaya dapat berfungsi dengan baik.

#### **3.6 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG**

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist

dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat karena metode ini praktis dan terstandarisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Sekretaris Kecamatan. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Sekretaris Kecamatan di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

<input type="checkbox"/>	Laporan Sudah Baik
<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input type="checkbox"/>	Laporan segera diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-Lain

---

---

---

---



### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Triwulan I Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran untuk mengatur dan mengendalikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan guna tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

Adapun capaian kinerja Sekretaris Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang pada Triwulan I Tahun 2025 dinilai Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 30,53% dan capaian serapan anggaran sebesar 2,66%.

Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

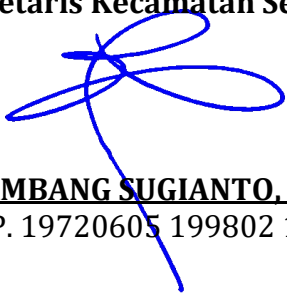
1. Penyusunan Renja terfokus kepada beberapa sub kegiatan yang bisa menambah nilai pelayanan publik dan sub kegiatan yang lebih penting;
2. Lebih meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan operasional perkantoran, pemenuhan pelaporan capaian keuangan walaupun tanpa anggaran
3. Perbaiki sarana dan prasarana yang tidak layak fungsi supaya dapat berfungsi dengan baik

Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Triwulan I Tahun 2025 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di periode yang akan datang.

Mengetahui,  
Atasan langsung  
**Camat Senduro**



Senduro, 15 Maret 2025  
**Sekretaris Kecamatan Senduro**

  
**BAMBANG SUGIANTO, S.Pd.**  
NIP. 19720605 199802 1 003



**LAPORAN KINERJA**  
**KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

**Triwulan I**  
**Tahun 2025**

**Pemerintah Kabupaten Lumajang**  
**Kecamatan Senduro**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang pada Triwulan I Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang pada Triwulan I Tahun 2025.

Senduro, 15 Maret 2025

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



**ANIN ALFIATIN ZAHRO, S.Pd.**

NIP. 19810420 200701 2 007

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan rumah tangga kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- 1** menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2** melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- 3** menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
- 4** melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan kecamatan;
- 5** melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kecamatan;
- 6** melakukan administrasi kepegawaian;
- 7** melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
- 8** melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
- 9** melakukan administrasi barang milik daerah;
- 10** melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
- 11** melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- 12** melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 13** melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 14** memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**2.1. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana yang telah ditetapkan Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang pada tanggal tanggal 10 Januari 2025 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti di bawah ini :

**Tabel 2.1.**  
**Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja**  
**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Senduro**

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025
1	2	3	4
1	Terfasilitasinya Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah (E81_B31)	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah (E81_D31)	100 %
2	Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (E81_B34)	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (E81_D34)	100 %
3	Terfasilitasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah (E81_B36)	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah (E81_D36)	100 %
4	Terfasilitasinya pengadaan Barang Milik Daerah (E81_B43)	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah (E81_D43)	100 %
5	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (E81_B45)	Persentase Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (E81_D45)	100 %
6	Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (E81_B48)	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah (E81_D48)	100 %

**2.2. CAPAIAN KINERJA**

Capaian kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2**  
**SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA**

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% s.d. 100%	Sangat Tinggi
2	76% s.d. 90%	Tinggi
3	66% s.d. 75%	Sedang
4	51% s.d. 65%	Rendah
5	0% s.d. 50%	Sangat Rendah

Adapun capaian Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam kurun waktu Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**  
**Tahun 2025**

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Terfasilitasinya Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah (E81_B31)	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah (E81_D31)	100,00 %	0,00 %	0,00 %	Sangat Rendah
2	Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (E81_B34)	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (E81_D34)	100,00 %	0,00 %	0,00 %	Sangat Rendah
3	Terfasilitasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah (E81_B36)	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah (E81_D36)	100,00 %	12,90 %	12,90 %	Sangat Rendah
4	Terfasilitasinya pengadaan Barang Milik Daerah (E81_B43)	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah (E81_D43)	100,00 %	50,00 %	50,00 %	Sangat Rendah
5	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (E81_B45)	Persentase Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (E81_D45)	100,00 %	16,67 %	16,67 %	Sangat Rendah
6	Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (E81_B48)	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah (E81_D48)	100,00 %	16,00 %	16,00 %	Sangat Rendah
					<b>15,91 %</b>	<b>Sangat Rendah</b>

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.3 di atas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.4 di bawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.4

## Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcomes) pada Triwulan I Tahun 2025

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu			Kinerja		
			Anggaran	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terfasilitasinya Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah (E81_B31)	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah (E81_D31)	7.599.500,00	0,00	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
2	Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (E81_B34)	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (E81_D34)	8.180.700,00	0,00	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
3	Terfasilitasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah (E81_B36)	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah (E81_D36)	132.283.259,00	3.364.500,00	2,54 %	100,00 %	12,90 %	12,90 %
4	Terfasilitasinya pengadaan Barang Milik Daerah (E81_B43)	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah (E81_D43)	24.631.604,00	620.000,00	2,52 %	100,00 %	50,00 %	50,00 %
5	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (E81_B45)	Persentase Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (E81_D45)	211.608.000,00	20.126.805,00	9,51 %	100,00 %	16,67 %	16,67 %
6	Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (E81_B48)	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah (E81_D48)	47.415.200,00	6.154.000,00	12,98 %	100,00 %	16,00 %	16,00 %
<b>Capaian rata-rata</b>				<b>Anggaran</b>	<b>4,59 %</b>	<b>Kinerja</b>	<b>15,93 %</b>	

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (cost per outcomes) di atas maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 15,93%, dan capaian serapan anggaran sebesar 4,59%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dalam pencapaian target kinerja.

### 2.3 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formulasi	Target 2025	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terfasilitasinya Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah (E81_B31)	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah (E81_D31)	Σ Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah yang dipenuhi \ Σ Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah yang direncanakan * 100	100,00 %	0,00 %	0,00 %	Sangat Rendah
2	Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (E81_B34)	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (E81_D34)	Σ fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dipenuhi / Σ fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang direncanakan * 100	100,00 %	0,00 %	0,00 %	Sangat Rendah
3	Terfasilitasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah (E81_B36)	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah (E81_D36)	Σ Fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah yang dipenuhi \ Σ Fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah yang direncanakan * 100	100,00 %	12,90 %	12,90 %	Sangat Rendah
4	Terfasilitasinya pengadaan Barang Milik Daerah (E81_B43)	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah (E81_D43)	Σ BMD yang dipenuhi \ Σ BMD yang direncanakan * 100	100,00 %	50,00 %	50,00 %	Sangat Rendah
5	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (E81_B45)	Persentase Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (E81_D45)	Σ Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi \ Σ Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan * 100	100,00 %	16,67 %	16,67 %	Sangat Rendah
6	Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (E81_B48)	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah (E81_D48)	Σ BMD yang mendapatkan pemeliharaan \ Σ BMD yang direncanakan pemeliharaan * 100	100,00 %	16,00 %		
<b>Capaian Rata-rata</b>						<b>15,91 %</b>	<b>Sangat Rendah</b>



Sasaran yang akan dicapai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Triwulan I Tahun 2025 sejumlah 5 (lima) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut:

1. Indikator kinerja Presentase fasilitasi administrasi BMD Perangkat Daerah dengan target 100% terealisasi sebesar 0% sehingga capaiannya sebesar 0% yang diperoleh dari formulasi perhitungan kinerja yaitu Jumlah fasilitasi administrasi BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi dibagi Jumlah fasilitasi administrasi BMD Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100%.
2. Indikator kinerja Presentase fasilitasi administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target 100% terealisasi sebesar 0% sehingga capaiannya sebesar 0% yang diperoleh dari formulasi perhitungan kinerja yaitu Jumlah fasilitasi administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi dibagi Jumlah fasilitasi administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100%
3. Indikator kinerja Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah dengan target 100% terealisasi sebesar 12,90% sehingga capaiannya sebesar 12,90% yang diperoleh dari formulasi perhitungan kinerja yaitu Jumlah fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi dibagi Jumlah fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100%.
4. Indikator kinerja Persentase pengadaan BMD dengan target 100% terealisasi sebesar 50% sehingga capaiannya sebesar 50% yang diperoleh dari formulasi perhitungan kinerja yaitu Jumlah pengadaan BMD yang terpenuhi dibagi Jumlah pengadaan BMD yang direncanakan dikali 100%.
5. Indikator kinerja Persentase fasilitasi jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100% terealisasi sebesar 16,67% sehingga capaiannya sebesar 16,67%, yang diperoleh dari formulasi perhitungan kinerja yaitu Jumlah fasilitasi jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dibagi Jumlah fasilitasi jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan dikali 100%.
6. Indikator kinerja Persentase pemeliharaan BMD dengan target 100% terealisasi sebesar 16,00% sehingga capaiannya sebesar 16,00%, yang diperoleh dari formulasi perhitungan kinerja yaitu Jumlah pemeliharaan BMD yang terpenuhi dibagi Jumlah pemeliharaan BMD yang direncanakan dikali 100%.

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 5 (lima) indikator kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan rata-rata persentase capaian kinerja sebesar 15,91% masuk kepada kategori "**Sangat Rendah**". Adapun penyebab keberhasilan ini antara lain karena:

1. Adanya komitmen bersama.
2. Dukungan perencanaan yang bagus
3. Dukungan data yang lengkap dan benar
4. Dukungan sarana prasarana yang memadai
5. Dukungan koordinasi yang cukup baik

Hal ini tidak terlepas dari komitmen Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Berkaitan dengan akuntabilitas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2025 maka dapat dilihat persentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut:

**Tabel 2.5**

**Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Triwulan I Tahun 2025**

No	Sub Kegiatan	Pagu		Capaian
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD (E81_C32)	4.236.000,00	0,00	0,00 %
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (E81_C33)	3.363.500,00	0,00	0,00 %
3	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya (E81_C35)	8.180.700,00	0,00	0,00 %
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (E81_C37)	3.393.270,00	451.000,00	13,29 %
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (E81_C38)	43.616.681,00	0,00	0,00 %
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (E81_C39)	10.624.378,00	705.500,00	6,64 %
7	Penyediaan Bahan/Material (E81_C40)	3.162.930,00	0,00	0,00 %
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu (E81_C41)	12.150.000,00	633.000,00	5,21 %

9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (E81_C42)	59.336.000,00	1.575.000,00	2,65 %
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (E81_C44)	24.631.604,00	620.000,00	2,52 %
11	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (E81_C46)	35.520.000,00	4.386.171,00	12,35 %
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (E81_C47)	176.088.000,00	15.740.634,00	8,94 %
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (E81_C49)	36.065.200,00	4.104.000,00	11,38 %
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (E81_C50)	11.350.000,00	2.050.000,00	18,06 %
	<b>Jumlah</b>	<b>431.718.263,00</b>	<b>30.265.305,00</b>	<b>7,01 %</b>
				<b>Sangat Rendah</b>

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori "**Sangat Rendah**", namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah:

1. Terbatas dan kurang terpeliharanya sarana dan prasarana kecamatan

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

1. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada di kecamatan

#### **2.4. RENCANA TINDAK LANJUT**

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu :

1. Mengajukan usulan untuk penambahan sarana dan prasarana yang baru dan memadai
2. Mengajukan usulan pemeliharaan, baik pemeliharaan gedung kantor maupun pemeliharaan peralatan kantor

## 2.5 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandarisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan Sudah Baik

- |                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Laporan kurang baik                 |
| <input type="checkbox"/> | Laporan segera diperbaiki           |
| <input type="checkbox"/> | Target dan realisasi diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/> | Capaian diteliti ulang              |
| <input type="checkbox"/> | Lain-Lain                           |
- 
-

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2025. Sebagai pengelola Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, maka Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Senduro senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Adapun capaian kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Senduro dinilai Berhasil dengan capaian kinerja sebesar **15,93%** dan capaian serapan anggaran sebesar **4,59%**.

Kesimpulan yang bisa diambil dari Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Senduro adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana kecamatan
2. Kurang terpeliharanya sarana dan prasarana kecamatan

Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Senduro Triwulan I Tahun 2025 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempumakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Mengetahui,  
Atasan langsung

Senduro, 15 Maret 2025

**Sekretaris Kecamatan**

**Kepala Sub Bagian Umum dan  
Kepegawaian**



**BAMBANG SUGIANTO, S.Pd.**  
NIP. 19720605 199802 1 003

**ANIN ALFIATIN ZAHRO, S.Pd.**  
NIP. 19810420 200701 2 007



**LAPORAN KINERJA**  
**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN**  
**Triwulan I Tahun 2025**

**Pemerintah Kabupaten Lumajang**  
**Kecamatan Senduro**

## KATA PENGANTAR

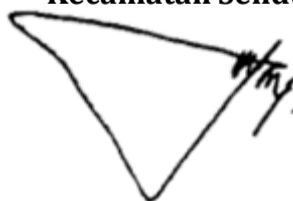
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bagian Keuangan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang pada Triwulan I Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Kepala Sub Bagian Keuangan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bagian Keuangan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Triwulan I Tahun 2025.

Senduro, 15 Maret 2025

**Kepala Sub Bagian Keuangan  
Kecamatan Senduro**



**SULIYANTO, Sos.**

**NIP. 19750412 200906 1 005**

## PENDAHULUAN

### A. Tugas pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan keuangan dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- d. menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat);
- e. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
- g. melakukan penyusunan laporan keuangan ;
- h. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;



## AKUNTABILITAS KINERJA

### 2.1 PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana yang telah ditetapkan Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang pada tanggal tanggal 10 Januari 2025 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti di bawah ini :

**Tabel 2. 1.**  
**Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja**  
**Kepala Sub Bagian Keuangan Kecamatan Senduro**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terfasilitasinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%
2.	Terfasilitasinya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%

### 2.1 CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan pada Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2**  
**SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA**

NO	IRTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILALAN REALISASI KINERJA
1	91% s.d. 100%	Sangat Tinggi
2	76% s.d. 90%	Tinggi
	66% s.d. 75%	Sedang
4	51% s.d. 65%	Rendah
5	0% s.d. 50%	Sangat Rendah

Adapun capaian Kepala Sub Bagian Keuangan dalam kurun waktu Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**

**Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan Triwulan I Tahun 2025**

<b>NO</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2025</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Terfasilitasinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (E81_B20)	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja (E81_D20)	100,00 %	0,00 %	0,00 %	<b>Sangat Rendah</b>
2	Terfasilitasinya Administrasi Keuangan Perangkat daerah (E81_B26)	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (E81_D26)	100,00 %	0,00 %	0 %	<b>Sangat Rendah</b>
<b>Capaian Rata-rata</b>					<b>0,00 %</b>	<b>Sangat Rendah</b>

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.3 di atas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.4 di bawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.4

## Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcomes) pada Triwulan I Tahun 2025

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja		
			Pagu	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terfasilitasinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (E81_B20)	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja (E81_D20)	17.553.000,00	1.869.300,00	10,65 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
2	Terfasilitasinya Administrasi Keuangan Perangkat daerah (E81_B26)	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (E81_D26)	1.209.007.124,00	164.834.211,00	13,63 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Capaian rata-rata</b>				<b>Anggaran</b>	<b>12,14 %</b>	<b>Kinerja</b>		<b>0,00 %</b>

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (cost per outcomes) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 0,00% dan capaian serapan anggaran sebesar 12,14%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dalam pencapaian target kinerja.

Hal ini tidak terlepas dari komitmen Kepala Sub Bagian Keuangan dengan Sekretaris Kecamatan yang dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja. Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kepala Sub Bagian Keuangan, penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja operasi tahun anggaran 2025 maka dapat dilihat persentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5. sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi  
Triwulan I Tahun 2025

NO	Sasaran Kegiatan	Pagu		Capaian
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Terfasilitasinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (E81_B20)	17.553.000,00	1.869.300,00	10,65 %
1.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (E81_B21)	4.767.000,00	0,00	0,00 %
1.2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (E81_B22)	2.800.000,00	0,00	0,00 %
1.3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (E81_B23)	1.360.000,00	0,00	0,00 %
1.4	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD (E81_B24)	3.382.000,00	1.869.300,00	55,27 %
1.5	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (E81_B25)	5.244.000,00	0,00	0,00 %
2	Terfasilitasinya Administrasi Keuangan Perangkat daerah (E81_B26)	1.209.007.124,00	164.834.211,00	13,63385 %
2.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (E81_B27)	1.173.540.124,00	164.834.211,00	14,04589 %
2.2	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (E81_B28)	29.712.000,00	0,00	0 %
2.3	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (E81_B29)	2.155.000,00	0,00	0,00 %
2.4	Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan pelaksanaan Akutansi SKPD (E81_B30)	3.600.000,00	0,00	0,00 %
<b>Jumlah</b>		<b>1.226.560.124,00</b>	<b>166.703.511,00</b>	<b>13,59 %</b>
<b>Sangat Rendah</b>				

### 2.3 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formulasi	Target 2025	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terfasilitasinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (E81_B20)	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja (E81_D20)	$\Sigma$ fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dipenuhi \ $\Sigma$ fasilitasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang direncanakan * 100 (E81_E20)	100,00 %	0,00 %	0,00 %	Sangat Rendah
2	Terfasilitasinya Administrasi Keuangan Perangkat daerah (E81_B26)	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (E81_D26)	$\Sigma$ Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi \ $\Sigma$ Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan * 100 (E81_E26)	100,00 %	0,00 %	0,00 %	Sangat Rendah
<b>Capaian Rata-rata</b>						<b>0,00 %</b>	<b>Sangat Rendah</b>

Sasaran yang akan dicapai Kepala Sub Bagian Keuangan pada Triwulan I Tahun 2025 sejumlah 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Persentase fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja dengan target 100% terealisasi sebesar 0,00% sehingga capaiannya sebesar 0,00% yang diperoleh dari formulasi perhitungan kinerja yaitu **Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen yang terpenuhi dibagi Jumlah administrasi fasilitasi penyusunan dokumen yang direncanakan dikali 100%**.
2. Indikator kinerja Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

dengan target 100% terealisasi sebesar 0,00% sehingga capaiannya sebesar 0,00% yang diperoleh dari formulasi perhitungan kinerja yaitu **Jumlah fasilitas administrasi keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah administrasi fasilitas keuangan yang direncanakan dikali 100%**.

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 2 (satu) indikator kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan dengan persentase capaian kinerja sebesar 0,00% masuk kepada kategori "**Sangat Rendah**". Adapun penyebab keberhasilan ini antara lain karena :

1. Adanya komitmen bersama;
2. Dukungan perencanaan yang bagus
3. Dukungan data yang lengkap dan benar
4. Dukungan sarana prasarana yang memadai
5. Dukungan koordinasi yang cukup baik

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori "**Sangat Rendah**", namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan adalah dalam penyusunan dokumen baik laporan keuangan, laporan perencanaan maupun capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang terkadang belum tepat hasil dan tepat waktu.

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah menyusun dokumen laporan keuangan, laporan perencanaan, laporan capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diharapkan juga tepat hasil.

#### **1.4. RENCANA TINDAK LANJUT**

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu meningkatkan jumlah dokumen laporan keuangan, dokumen perencanaan dan capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bagian Keuangan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandardisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kepala Sub Bagian Keuangan di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan Sudah Baik

- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-Lain

---

---

---

---

---

---

---

---



## PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bagian Keuangan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2025. Sebagai pengelola keuangan dan penyusunan program serta pelaporan, maka Kepala Sub Bagian Keuangan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Adapun capaian kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang dinilai berhasil dengan capaian kinerja sebesar 0,00% dan capaian serapan anggaran sebesar 12,14%.

Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bagian Keuangan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang adalah adanya permasalahan dalam penyusunan dokumen baik laporan keuangan, laporan perencanaan maupun capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang terkadang belum tepat hasil dan tepat waktu, untuk itu Kepala Sub Bagian Keuangan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang diharapkan pada tahun depan untuk meningkatkan jumlah dokumen laporan keuangan, dokumen perencanaan dan capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tepat hasil.

Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bagian Keuangan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Triwulan I Tahun 2025 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Mengetahui,  
Atasan langsung

**Sekretaris Kecamatan Senduro**

**BAMBANG SUGIANTO, S.Pd.**  
NIP. 19720605 199802 1 003

Senduro, 15 Maret 2025

**Kepala Sub Bagian Keuangan**

**SULIYANTO, S.Sos.**  
NIP. 19750412 200906 1 005



# **LAPORAN KINERJA TAHUNAN**

## **KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN**

### **Triwulan I Tahun 2025**

**Pemerintah Kabupaten Lumajang**  
**Kecamatan Senduro**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang pada Triwulan I Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Triwulan I Tahun 2025.

Senduro, 15 Maret 2025

Kepala Seksi Pemerintahan  
Kecamatan Senduro



**AMINUDIN, S.Sos.**

NIP. 19670710 200701 1 047

## PENDAHULUAN

### A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dari pelaporan urusan Pemerintahan. Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

1. menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
3. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
4. melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
5. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
6. melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
9. melaksanakan pengkoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
10. melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
11. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
12. melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
13. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
14. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa;
15. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
16. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
17. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
18. melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian

perangkat desa;

19. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
20. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
21. melaksanakan pengkoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
22. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
23. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
24. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**2.1. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviu Perjanjian Kinerja/Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang pada tanggal 10 Januari 2025 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti di bawah ini :

**Tabel 2.1.**  
**Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja**  
**Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Senduro**  
**Triwulan I Tahun 2025**

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024
1	2	3	4
1	Terfasilitasinya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (E81_B65)	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (E81_D65)	2 fasilitasi
2	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (E81_B69)	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (E81_D69)	1 fasilitasi
3	Terfasilitasinya Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (E81_B74)	Persentase Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (E81_D74)	100 %

**2.2. CAPAIAN KINERJA**

Capaian kinerja Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Senduro Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat Laporan Kinerja Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Senduro Triwulan I Tahun 2025 capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2**  
**SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA**

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91%≤100%	Sangat Tinggi
2	76%≤90%	Tinggi
3	66%≤75%	Sedang
4	51%≤65%	Rendah
5	≤50%	Sangat Rendah

Adapun capaian Kepala Seksi Pemerintahan dalam kurun waktu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**

**Capaian Kinerja Kepala Seksi Pemerintahan  
Kecamatan Senduro  
Triwulan I Tahun 2025**

<b>NO</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2025</b>		<b>Realisasi</b>		<b>Capaian</b>		<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>5</b>		<b>6</b>		<b>7</b>
1	Terfasilitasinya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (E81_B65)	Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2	fasilitasi	2	fasilitasi	100	%	<b>Sangat Tinggi</b>
2	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (E81_B69)	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (E81_D69)	1	fasilitasi	1	fasilitasi	100	%	<b>Sangat Tinggi</b>
3	Meningkatnya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Presentase Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	%	100	%	100	%	<b>Sangat Tinggi</b>
<b>Capaian Rata-rata</b>							<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Tabel 2.4

## Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcomes)

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja		
			Pagu	Realisasi	Capaian	Target 2025	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terfasilitasinya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (E81_B65)	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (E81_D65)	15.100.000,00	0,00	0,00 %	2 fasilitasi	2 fasilitasi	100 %
2	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (E81_B69)	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (E81_D69)	7.200.000,00	0,00	0,00 %	1 fasilitasi	1 fasilitasi	100 %
3	Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (E81_B74)	Presentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (E81_D74)	40.320.000,00	0,00	0,00 %	100 %	100 %	100,00 %
<b>Capaian Rata-rata</b>					<b>0,00 %</b>			<b>100,00 %</b>



Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (cost per outcomes) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kepala Seksi Pemerintahan pada Tahun 2025 sebesar 100,00% dan capaian serapan anggaran sebesar 0,00%. Capaian kinerja sudah melebihi target pada Triwulan I Tahun 2025, namun untuk penyerapan anggaran belum memenuhi target dikarenakan ada beberapa sub kegiatan yang belum dilaksanakan karena masih mengikuti jadwal pada anggaran kas.

### 2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formulasi	Target 2025	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (E81_B64)	PRESENTASE FASILITASI KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (E81_D64)	Σ Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan / Σ Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan * 100	100 %	100 %	100,00 %	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (E81_B68)	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (E81_D68)	Σ Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan / Σ Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan * 100	100 %	100 %	100,00 %	Sangat Tinggi
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (E81_B71)	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu (E81_D71)	Σ desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu / Σ desa * 100	67 %	0 %	0,00 %	Sangat Rendah
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu (E81_D73)	Σ desa yang menetapkan APBDes tepat waktu / Σ desa * 100	83 %	0 %	0,00 %	Sangat Rendah
		Presentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (E81_D74)	Σ desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu dibagi Σ desa x 100	100 %	0 0	0,00 %	Sangat Rendah
<b>Capaian Rata-rata</b>						<b>100,00 %</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Sasaran yang akan dicapai Kepala Seksi Pemerintahan pada Triwulan I Tahun 2025 sejumlah 3 (Tiga) sasaran dengan 5 (Lima) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan target **100%** pada Triwulan I Tahun 2025 telah terealisasi 100%. **Kompetensi personil Linmas masih belum maksimal**
2. Indikator kinerja Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target 100% terealisasi sebesar **100%** sehingga capaiannya sebesar **100%. Masih adanya gangguan keamanan dan ketertiban umum**
3. Indikator kinerja Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu dengan target 66,67% pada Triwulan I Tahun 2025 telah terealisasi 0%. **Pendampingan terkait penyusunan RAB yang sudah optimal**
4. Indikator kinerja Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu dengan target 83,33% telah terealisasi 0% karena untuk penyusunan dan penetapan APBDes berdasarkan **Peraturan yang berubah-ubah sehingga dapat menghambat penyusunan APBDes.**
5. Indikator kinerja Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu dengan target 100% terealisasi sebesar **0%** sehingga capaiannya sebesar **0%**.

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap kinerja Kepala Seksi Pemerintahan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,00% masuk kepada kategori **“Sangat Tinggi”**. Adapun penyebab keberhasilan ini antara lain karena:

1. Adanya komitmen bersama.
2. Dukungan perencanaan yang bagus
3. Dukungan data yang lengkap dan benar
4. Dukungan sarana prasarana yang memadai
5. Dukungan koordinasi yang cukup baik

Hal ini tidak terlepas dari komitmen Kepala Seksi Pemerintahan dengan Camat yang dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja. Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kepala Seksi Pemerintahan, penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2025 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut :

**Tabel 2.5****Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025**

NO	Sasaran Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	6
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (E81_B64)	15.100.000,00	-	0,00 %
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (E81_B65)	15.100.000,00	-	0,00 %
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (E81_B68)	7.200.000,00	-	0,00 %
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (E81_B69)	7.200.000,00	-	0,00 %
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (E81_B71)	40.320.000,00	-	0,00 %
3	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (E81_B74)	40.320.000,00	-	0,00 %
<b>Jumlah</b>		<b>62.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori “Sangat Rendah”, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

#### 2.4. Hambatan dalam pencapaian target kinerja

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

1. Adanya sebagian desa yang lambat dalam penyelesaian penyusunan dokumen karena keterbatasan kemampuan SDM
2. Kurangnya pemahaman Perangkat Desa terhadap regulasi-regulasi yang ada

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa yang baru dengan cara meningkatkan pemahaman terhadap aturan yang ada
2. Perlu adanya pemahaman pelaksana kegiatan sesuai tugasnya
3. Monitoring dan Evaluasi secara berkala di setiap kesempatan ada kunjungan ke desa

4. Pendampingan khusus dalam setiap tahapan penyusunan dokumen administrasi desa

## 2.5. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu :

1. Masing-masing desa perlu mengusulkan Pelatihan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa yang bisa didanai dari ADD
2. Perlu adanya pelatihan terhadap Pelaksana Kegiatan baik PTPKD, PKD dan TPK

## 2.6. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2025 Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandardisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kepala Seksi Pemerintahan di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan Sudah Baik

- |                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Laporan kurang baik                 |
| <input type="checkbox"/> | Laporan segera diperbaiki           |
| <input type="checkbox"/> | Target dan realisasi diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/> | Capaian diteliti ulang              |
| <input type="checkbox"/> | Lain-Lain                           |

---

---

---

---

---

---

---

---

**BAB III**  
**PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKj) Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Triwulan I Tahun 2025. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Adapun capaian kinerja Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang dinilai Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100,00% dan capaian serapan anggaran sebesar 0,00%.

Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari Laporan Kinerja (LKj) Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang adalah Pelatihan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa baik BPD, Pelaksana Kegiatan (PTPKD, PKD dan TPK) yang didanai dari ADD agar lebih memahami aturan yang ada serta melakukan pendampingan secara rutin pada setiap tahapan penyusunan dokumen administrasi.

Laporan Kinerja (LKj) Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Triwulan I Tahun 2025 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di periode yang akan datang.

Senduro, 15 Maret 2025

Mengetahui,

**Camat Senduro**



**Kepala Seksi Pemerintahan**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "AMINUDIN S.Sos.", written over the printed name.

**AMINUDIN. S.Sos.**

NIP. 19671128 198903 1 007



**LAPORAN KINERJA TAHUNAN**  
**KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**TRIWULAN I TAHUN 2025**

**Pemerintah Kabupaten Lumajang**  
**Kecamatan Senduro**

## KATA PENGANTAR

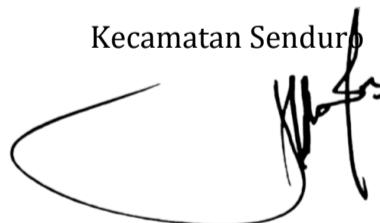
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang pada Triwulan I Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Triwulan I Tahun 2025.

Senduro, 27 Maret 2025

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat  
Kecamatan Senduro



**TUTIK SAKARIA SADIKIN, S.E.**

NIP. 19700624 201001 2 004

## PENDAHULUAN

### A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dari pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
4. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
5. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
6. melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
7. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
8. menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
9. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
10. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
11. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.



**BAB I**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**2.1. PERJANJIAN KINERJA**

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviu Perjanjian Kinerja/Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang pada tanggal 10 Januari 2025 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti di bawah ini :

**Tabel 2.1.**  
**Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja**  
**Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Senduro**  
**Triwulan I Tahun 2025**

<b>NO</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2025</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Terfasilitasinya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (E81_B57)	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa (E81_D57)	100 %
2	Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (E81_B61)	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan (E81_D61)	100 %

**2.2. CAPAIAN KINERJA**

Capaian kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Senduro Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat Laporan Kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Senduro Triwulan I Tahun 2025 capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2**  
**SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA**

<b>NO</b>	<b>INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA</b>	<b>KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA</b>
1	91% s.d. 100%	Sangat Tinggi
2	76% s.d. 90%	Tinggi
3	66% s.d. 75%	Sedang
4	51% s.d. 65%	Rendah
5	0% s.d. 50%	Sangat Rendah

Adapun capaian Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam kurun waktu Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Capaian Kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat**  
 Triwulan I Tahun 2025

<b>NO</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2025</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Terfasilitasinya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (E81_B57)	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa (E81_D57)	100 %	50 %	50,00 %	<b>Sangat Rendah</b>
2	Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (E81_B61)	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan (E81_D61)	100 %	7 %	6,67 %	<b>Sangat Rendah</b>
<b>Capaian Rata-rata</b>					<b>28,33 %</b>	<b>Sangat Rendah</b>

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcomes)**

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja		
			Pagu	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terfasilitasinya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (E81_B57)	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa (E81_D57)	78.028.075,00	11.750.000,00	15,06 %	100,00 %	50,00 %	50,00 %
2	Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (E81_B61)	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan (E81_D61)	56.575.000,00	900.000,00	1,59 %	100,00 %	6,67 %	6,67 %
<b>Capaian Rata-rata</b>			<b>8,32 %</b>			<b>28,33 %</b>		

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (cost per outcomes) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebesar 90,00% dan capaian serapan anggaran sebesar 28,33%. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi sangat tinggi dalam pencapaian target kinerja sebagai akibat adanya beberapa kegiatan yang telah terlaksana dikarenakan sesuai time schedule untuk penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Untuk Seksi Pemberdayaan Masyarakat semua kegiatan yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik.

Hal ini tidak terlepas dari komitmen Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan Camat yang dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja. Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja operasi tahun anggaran 2025 maka dapat dilihat persentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5. sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi**  
**Triwulan I Tahun 2025**

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (E81_C56)	134.603.075,00	12.650.000,00	9,40 %
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (E81_C57)	78.028.075,00	11.750.000,00	15,06 %
2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (E81_C61)	56.575.000,00	900.000,00	1,59 %
<b>Jumlah</b>		<b>134.603.075,00</b>	<b>12.650.000,00</b>	<b>9,40 %</b>

### 2.3 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formulasi	Target 2025	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (E81_C56)	RATA-RATA PRESENTASE FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (E81_D56)	$\Sigma$ (% Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa + % Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan) / 2 (E81_E56)	100,00 %	28,33 %	28,33 %	Sangat Rendah
<b>Capaian Rata-rata</b>						<b>28,33 %</b>	<b>Sangat Rendah</b>

Sasaran yang akan dicapai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Triwulan I Tahun 2025 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan analisis Indikator kinerja rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat dengan target 100% terealisasi 28,33% sehingga capaiannya sebesar 28,33%.

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 1 (satu) indikator kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan persentase capaian kinerja sebesar 28,33% masuk kepada kategori "**Sangat Rendah**". Adapun penyebab keberhasilan ini antara lain karena :

1. Adanya komitmen bersama;
2. Dukungan perencanaan yang bagus;
3. Dukungan data yang lengkap dan benar;
4. Dukungan sarana prasarana yang memadai;
5. Dukungan koordinasi yang cukup baik.

#### **2.4 HAMBATAN DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya semangat gotong royong di masyarakat;
2. Belum tertibnya administrasi di desa;
3. Sangat terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan kegiatan rutin PKK

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya pengertian dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya gotong royong
2. Perlu adanya pembinaan dalam pengelolaan tertib administrasi di Desa
3. Perlunya tenaga administratif yang secara rutin mengurus kegiatan PKK

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu :

- a. Peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah desa agar dianggarkan di APBDesa;
- b. Kegiatan gotong royong agar diaktifkan lagi untuk meningkatkan kebersamaan;
- c. Perlu pendampingan secara kontinyu tentang administrasi di desa agar lebih tertib;
- d. Perlu diusulkan tenaga administratif yang secara rutin mengurus kegiatan PKK;

#### **2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG**

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kepala Seksi

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandardisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Sekretaris Kecamatan. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan Sudah Baik

- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-Lain

---

---

---

---

---

---

---

## PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Tahunan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Triwulan I Tahun 2025. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Adapun capaian kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang dinilai tinggi dengan capaian kinerja sebesar 28,33% dan capaian serapan anggaran sebesar 9,40%.

Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari Laporan Kinerja (LKj) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

1. Desa menganggarkan dalam APBDesa untuk kegiatan peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
2. Penurunan peserta gotong royong karena kesadaran masyarakat yang perlu dipupuk kembali;
3. Untuk bisa memenuhi sebagai pemenang lomba desa perlu diawali dengan tertib administrasi dan perbaikan infrastruktur lainnya;
4. Agar pelaksanaan pembinaan Administrasi PKK bisa berjalan dengan baik diperlukan tenaga administratif yang secara khusus menangani PKK.

Laporan Kinerja (LKj) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Triwulan I Tahun 2025 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di periode yang akan datang.

Mengetahui,  
Atasan langsung

**Camat Senduro**



**Drs. PUJANTO**

NIP. 19681114 199003 1 004

Senduro, 15 Maret 2025

**Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

**Tutik Sakaria Sadikin, S.E.**

NIP. 19700624 201001 2 004



**LAPORAN KINERJA TRIWULAN I**  
**PENGADMINISTRASI UMUM**  
**PADA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

**Tahun 2025**

**Pemerintah Kabupaten Lumajang**  
**Kecamatan Senduro**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Laporan Kinerja Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas capaian kinerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja.

Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025. Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang memiliki tugas melakukan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen umum dan kepegawaian dan dokumen pelaporan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

## BAB II

### AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

#### 2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana tertuang dalam Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2025 dapat disajikan sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1.**  
**Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Pengadministrasi Umum**  
**pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

<b>NO</b>	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2025</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	12 Laporan
2	Terselesaikannya Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan
3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket
4	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan

#### 2.2. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran.

Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Adapun capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 2.3.**  
**Capaian Kinerja Pengadministrasi Umum**  
**pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**  
**Triwulan I Tahun 2025**

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (E81_B32)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun (E81_D32)	12 laporan	0 0	0 %	<b>Sangat Rendah</b>
2	Terselesaikannya Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD (E81_B33)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang terselesaikan (E81_D33)	12 laporan	0 0	0 %	<b>Sangat Rendah</b>
3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor (E81_B38)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (E81_D38)	3 paket	0 paket	0 %	<b>Sangat Rendah</b>
4	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (E81_B42)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (E81_D42)	12 laporan	1 laporan	8 %	<b>Sangat Rendah</b>
			Capaian Rata-rata		2,78 %	<b>Sangat Rendah</b>

**2.3 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### BAB III

### PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebesar 2,78% dengan kriteria "Sangat Rendah"

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan cara sebagai berikut :

1. Pegawai kecamatan sebaiknya diikutkan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan karena melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan diajarkan bagaimana sebaiknya para pegawai itu bekerja. Tentunya dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan jadi tidak hanya asal mengerjakan tugas tanpa memperhatikan kualitasnya. Dengan begitu, para pegawai akan bekerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan mereka menjadi mengerti akan tugasnya karena telah sesuai dengan kemampuan yang telah mereka peroleh.
2. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor baik yang habis pakai maupun barang inventaris kantor (perlengkapan kantor). Dengan adanya sarana dan prasarana yang lebih memadai dapat menunjang seluruh aktivitas pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan baik secara kuantitas maupun kualitas.

Mengetahui,  
Atasan langsung

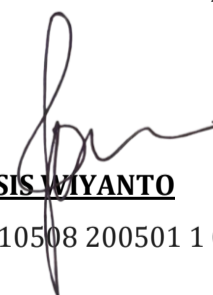
Senduro, 15 Maret 2025

**Kepala Sub Bagian Umum dan  
Kepegawaian**

**Pengadministrasi Umum  
pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**



**ANIN ALFIATIN TAHRO, S.Pd.**  
NIP. 19810420 200701 2 007

  
**ASIS WIYANTO**  
NIP. 19710508 200501 1 007



**LAPORAN KINERJA  
PENGADMINISTRASI UMUM  
PADA SEKSI PELAYANAN UMUM**

**Triwulan I  
Tahun 2025**

**Pemerintah Kabupaten Lumajang  
Kecamatan Senduro**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Laporan Kinerja Tahunan Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas capaian kerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja.

Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025. Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang memiliki tugas melakukan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen umum dan kepegawaian dan dokumen pelaporan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Seksi Pelayanan Umum.

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN**

**2.1. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum sebagaimana tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKI) Tahun 2025 dapat disajikan sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1.**  
**Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja**  
**Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum**  
**Triwulan I Tahun 2025**

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024
1	2	3	4
1	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (E81_B53)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (E81_D53)	2 dokumen
2	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan (E81_B55)	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan (E81_D55)	12 laporan

**2.2. CAPAIAN KINERJA**

Capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Adapun capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Capaian Kinerja Pengadministrasi Umum Pada Seksi Pelayanan Umum**  
**Triwulan I Tahun 2025**

N O	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (E81_B53)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (E81_D53)	2 dokumen	0 dokumen	0,00 %	<b>Sangat Rendah</b>
2	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan (E81_B55)	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan (E81_D55)	12 laporan	0 laporan	0,00 %	<b>Sangat Rendah</b>
<b>Capaian Rata-rata</b>					<b>0,00 %</b>	<b>Sangat Rendah</b>

**2.3 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG**

.....  
.....

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKj) Tahunan Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Triwulan I Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum sebesar 0,00% dengan kriteria "**Sangat Rendah**".

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan cara sebagai berikut :

1. Pegawai kecamatan sebaiknya diikutkan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan karena melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan diajarkan bagaimana sebaiknya para pegawai itu bekerja. Tentunya dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan jadi tidak hanya asal mengerjakan tugas tanpa memperhatikan kualitasnya. Dengan begitu, para pegawai akan bekerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan mereka menjadi mengerti akan tugasnya karena telah sesuai dengan kemampuan yang telah mereka peroleh.
2. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor baik yang habis pakai maupun barang inventaris kantor (perlengkapan kantor). Dengan adanya sarana dan prasarana yang lebih memadai dapat menunjang seluruh aktivitas pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan baik secara kuantitas maupun kualitas.

Mengetahui,  
Atasan langsung

Senduro, 15 Maret 2025


**Kepala Seksi Pelayanan Umum**

**Kecamatan Senduro**

**SUPRAYOGI**

NIP. 19671128198903 1 007

**Pengadministrasi Umum  
pada Seksi Pelayanan Umum**



**ATIK SURYANINGATI**

NIP. 19831219 201406 2 002







**LAPORAN KINERJA  
PENGADMINISTRASI UMUM  
PADA SEKSI PEMERINTAHAN**

**TRIWULAN I  
Tahun 2025**

**Pemerintah Kabupaten Lumajang  
Kecamatan Senduro**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Laporan Kinerja Tahunan Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemerintahan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas capaian kinerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja.

Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Triwulan I 2025. Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemerintahan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang memiliki tugas melakukan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen umum dan kepegawaian dan dokumen pelaporan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Seksi Pemerintahan.

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN**

**2.1. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKI) Tahun 2025 dapat disajikan sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1.**

**Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemerintahan**

<b>NO</b>	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2025</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (E81_B66)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (E81_D66)	1 laporan
2	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (E81_B67)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (E81_D67)	1 laporan
3	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (E81_B70)	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (E81_D70)	12 dokumen
4	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (E81_B75)	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (E81_D75)	22 dokumen
5	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (E81_B76)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (E81_D76)	12 dokumen

**2.2. CAPAIAN KINERJA**

Capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemerintahan Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Adapun capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemerintahan tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Capaian Kinerja Pengadministrasi Umum Pada Seksi Pemerintahan**  
**Triwulan I Tahun 2025**

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (E81_B66)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (E81_D66)	1 laporan	0 laporan	0,00 %	<b>Sangat Rendah</b>
2	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (E81_B67)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (E81_D67)	1 laporan	0 laporan	0,00 %	<b>Sangat Rendah</b>
3	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (E81_B70)	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (E81_D70)	12 dokumen	0 dokumen	0,00 %	<b>Sangat Rendah</b>
4	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (E81_B75)	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (E81_D75)	22 dokumen	0 dokumen	0,00 %	<b>Sangat Rendah</b>
5	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (E81_B76)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (E81_D76)	12 dokumen	0 dokumen	0,00 %	<b>Sangat Rendah</b>
Capaian Rata-rata					0,00 %	<b>Sangat Rendah</b>

**2.3 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG**

.....

.....

.....

.....

.....

### BAB III

### PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Tahunan Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemerintahan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemerintahan sebesar 0,00% dengan kriteria "**Sangat Rendah**".

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan cara sebagai berikut :

1. Pegawai kecamatan sebaiknya diikutkan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan karena melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan diajarkan bagaimana sebaiknya para pegawai itu bekerja. Tentunya dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan jadi tidak hanya asal mengerjakan tugas tanpa memperhatikan kualitasnya. Dengan begitu, para pegawai akan bekerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan mereka menjadi mengerti akan tugasnya karena telah sesuai dengan kemampuan yang telah mereka peroleh.
2. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor baik yang habis pakai maupun barang inventaris kantor (perlengkapan kantor). Dengan adanya sarana dan prasarana yang lebih memadai dapat menunjang seluruh aktivitas pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan baik secara kuantitas maupun kualitas.

Mengetahui,  
Atasan langsung

Senduro, 15 Maret 2025

**Kepala Seksi Pemerintahan  
Kecamatan Senduro**

**Pengadministrasi Umum  
pada Seksi Pemerintahan**



**SUTIYONO**  
NIP. 19680511 201001 1 001